

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari wilayah-wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan beberapa kelurahan atau desa. Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa merupakan dasar dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara, sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan.

Partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima layanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Partisipasi masyarakat dalam suatu desa merupakan hal penting untuk meningkatkan, mendorong, mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pembangunan suatu desa, selain itu masyarakat juga dapat membantu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” .

pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pemerintah yang ada di desa tersebut. Hal ini karena masyarakat mengetahui secara pasti hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Ide-ide masyarakat menjadi pertimbangan bagi perangkat desa sebagai orang yang menjalankan pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan keadaan yang ada.<sup>2</sup>

Pada tataran pemerintahan, desa merupakan wadah bagi masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah desa, masyarakat desa dan swasta membuat suatu komitmen bersama dalam pembangunan pengelolaan pemerintah desa. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam suatu desa diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangga desanya, sehingga masyarakat itu bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat sebagai penunjang dalam mengambil keputusan secara nasional pada negara, dimana rakyat sebagai pengontrol dalam pelaksanaan pemerintah, sedangkan pemerintah pusat mempunyai tugas mengawasi pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hal tersebut berdampak besar pada pemerintah desa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa

---

<sup>2</sup> Firda Fuji Rahayu dan Maya Mustika Kartika Sari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Berprestasi Di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo," *UNESA* 06 No 03 (2018): 2.

dengan melaksanakan evaluasi pada pemerintah desa dengan berbagai program, seperti lomba desa dan kelurahan, hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pemerintah desa. Evaluasi ini dapat dijadikan sebagai pembenahan pemerintah yang mengutamakan kepentingan umum (rakyat) dibandingkan kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan dalam masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang mereka mainkan. Satu individu atau kelompok individu inilah yang lazim disebut elit. Menurut Laswell, elit adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan orang lain.<sup>4</sup> Secara umum elit merupakan orang-orang yang mampu menduduki jabatan yang tinggi di dalam masyarakat, di manapun kaum elit ini berada pasti memiliki suatu *power* (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan.<sup>5</sup> Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elit mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan.

Pareto menjelaskan bahwa elit terbagi menjadi dua, yaitu elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elite*).<sup>6</sup> Elit lokal merupakan orang perorangan atau kelompok kecil dari orang

<sup>3</sup> Firda Fuji Rahayu dan Maya Mustika Kartika Sari.

<sup>4</sup> Abdul Chalik, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 26.

<sup>5</sup> Hayono Harun dan Subehan Malik, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa" 2 (2021): 69.

<sup>6</sup> *Governing elite* yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elit karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan desa (bersifat formal). Elit semacam ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dari pemerintahan yang lebih atas (supralokal). Sedangkan *non governing elite*, yaitu elit yang tidak memerintah atau tidak menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan, seperti para bangsawan, tokoh-tokoh

yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat dan orang-orang yang mempunyai kemampuan serta kekuasaan yang relatif lebih tinggi dibanding masyarakat umum.<sup>7</sup> Elit lokal adalah elit yang menempati kedudukan puncak di dalam struktur-struktur sosial di tingkat lokal. Orang yang dianggap sebagai elit lokal adalah orang yang telah mampu dan memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang merupakan cara seseorang dalam menjalankan kebijaksanaan yang harus dilakukan dalam mengontrol serta membimbing tindakan dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Menurut Thompson elit lokal terdiri dari berbagai bentuk, berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya, yaitu pertama, elit lokal yang muncul karena adanya kekuatan ekonomi yang dimiliki, seperti penguasa atau tuan tanah daerah yang mampu menggerakkan masyarakat disekitarnya di atas fundamental ekonominya itu. Kedua, elit lokal muncul dari kekuasaan publik yang melekat pada dirinya, seperti pejabat-pejabat birokrasi di daerah yang dapat menentukan arah sosial dan mengendalikan warga sekitarnya.<sup>8</sup>

adat dan agama, orang kaya desa dan pegawai negeri. Mereka dikategorikan elit karena kapasitas personal, kemampuan dan pengetahuan adat dan agama yang dimiliki serta kekayaannya, sehingga memiliki kelebihan dan selalu menjadi panutan sikap dan pedoman tindakan bagi masyarakat.

<sup>7</sup> Nurhasim dalam Al Hamdi mengklasifikasikan elit lokal dan membaginya menjadi dua kategori: (1)elit politik lokal adalah orang yang mempunyai jabatan baik legislatif maupun eksekutif setelah memenangkan pemilihan secara demokratis ditingkat lokal dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui kebijakan politik. Elit politik lokal misalnya adalah Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPRD, dan Kepala Desa. Kedua elite non politik lokal adalah seorang yang mempunyai jabatan strategis dan memiliki pengaruh sehingga bisa memerintah orang lain di dalam lingkungan masyarakat. Elit non politik lokal misalnya elit agama (kyai, Ulama/Pimpinan lembaga keagamaan di daerah tersebut), elit ekonomi, elit organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Lebih lanjut baca Al Hamdi, "Peran Modal Sosial Parabela Dalam Mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Pasca Orde Baru, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 06, No 4 (2020).

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, "Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis (Studi Kasus Kiai Aceng Malki Di Pesantren Hidayatullah Faizien Kabupaten Garut)" (Universitas Siliwangi, 2020).

Elit lokal memiliki peranan sentral dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang berkembang untuk menghadapi perubahan yang berpengaruh pada program pembangunan dan roda pemerintahan desa. Keberadaan elit lokal diperlukan dalam sistem dan mekanisme untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu elit lokal juga berperan untuk memobilisasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada tiap proses pembangunannya.<sup>9</sup>

Penelitian mengenai peran elit lokal memberikan ketertarikan dalam dunia penelitian, khususnya dalam Ilmu Politik. Studi tentang peran elit lokal sudah banyak diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut di antaranya penelitian Latifah Ulfa Alfitri, (2018) dan Agus Mirian Putra, (2019), I Putu Wahyu Mantrawan, Piers Andreas Noak, Tedi Erviantono, (2018) menjelaskan peran elit lokal dalam pemberdayaan masyarakat yang berupa bimbingan, penyuluhan, arahan, serta ajakan terhadap masyarakat dalam meningkatkan usaha masyarakat di desa. Sedangkan dari penelitian Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, (2018) Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi pilkada.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti identifikasi, peneliti melihat bahwa penelitian-penelitian tersebut hanya berfokus membahas

---

<sup>9</sup> Latifah Ulfa Alfitri, "Peran Elit Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa" (Muhammadiyah Makasar, n.d.).

mengenai peran elit lokal dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk memenangkan pasangan calon dalam pemilu. Akan tetapi, terdapat celah bagi peneliti dari berbagai penelitian tersebut, yaitu belum menjelaskan mengenai bagaimana peran elit lokal dalam mewujudkan nagari berprestasi. Untuk itu penelitian ini berfokus pada fenomena prestasi yang diraih oleh Nagari Taram secara berturut-turut pada tingkat regional hingga tingkat nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari peran elit lokal Nagari Taram dalam mengajak masyarakat dan mampu membangun hubungan yang baik sehingga masyarakat Nagari Taram turut aktif dalam proses pembangunan nagari hingga akhirnya mendapat penghargaan menjadi Nagari Berprestasi dengan memiliki banyak keunggulan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Di Sumatera Barat istilah desa dikenal dengan sebutan nagari. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Dalam sejarah perkembangannya nagari merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah.<sup>10</sup> Nagari merupakan pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna. Didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu puncak atau ketua adatnya selaku pimpinan

<sup>10</sup> Di Minangkabau, nagari diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang di dalamnya terdapat struktur perlengkapan nagari yang di sebut dengan pemerintah nagari. Yang tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997).

pemerintahan tertinggi. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk adanya kesatuan masyarakat hukum adat, maka sebagai suatu persekutuan nagari sangat memenuhi syarat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat yang otonom.<sup>11</sup>

Pemerintah Nagari sebagai bagian dari pemerintahan yang otonom berwenang untuk melaksanakan pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, yang berbunyi: (a) pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari, (b) sebelum Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Pemerintah Nagari harus melakukan konsultasi/ koordinasi dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Harta kekayaan itu dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Nagari untuk kepentingan Nagari dan Masyarakat Nagari. Pemanfaatan dan pengelolaan tersebut merupakan pendayagunaan yang dilakukan dalam memanfaatkan kekayaan nagari yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nagari tetapi juga melibatkan pihak luar dengan tidak mengurangi nilai terhadap kekayaan nagari yang bersangkutan. Pembangunan di desa tidak dapat dipisahkan dari peyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan.

Nagari Taram berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Taram dibentuk pada tahun 2003, dengan luas

---

<sup>11</sup> Tengku Rika Valentina, *Dinamika Politik Lokal di Minangkabau: Nagari dalam Negara dan Model Demokrasinya* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

daerah 6.059 Ha yang memiliki tipologi persawahan dengan klasifikasi swasembada. Dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 7.622 jiwa dengan 2.186 kepala keluarga. Nagari Taram merupakan salah satu dari tujuh puluh sembilan nagari yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Taram yang terletak di Kecamatan Harau merupakan merupakan salah satu Nagari Berprestasi di Sumatera Barat. Nagari Taram berhasil meraih juara 1 Regional 1 Nasional dalam lomba Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional. Nagari Taram melaju ke Tingkat Nasional dengan membawa inovasi dan keunggulan yang cukup banyak, dimulai dari menjadikan lahan kritis menjadi lahan jagung yang bibitnya disediakan oleh Wali Nagari Taram bagi masyarakat yang tidak mampu membeli bibit jagung, selain itu juga adanya Relawan PELITA yang menyukseskan SWA-JKN di Nagari Taram. Relawan PELITA ini juga mencarikan “Bapak angkat” bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS. Keunggulan lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi berupa pelayanan publik dalam aneka aplikasi *E-Government* dan adanya PADAN (Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari).<sup>12</sup>

Nagari taram juga nagari yang sudah mendapatkan beberapa prestasi mulai dari aktifitas ekonomi kreatif seperti usaha Jamur Tiram, Minyak Atsiri, Gabah Basah, Beras, Jagung, sayur-sayuran, olahan makanan, souvenir dan pariwisata Kapalo Banda Taram. Kemudian dalam pemerintah nagari, Nagari Taram ini telah memiliki website nagari, aplikasi berbasis IT (*Information and*

---

<sup>12</sup> Website Nagari Taram.2018. *Nagari Taram Juarai Lomba Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional 1 Nasional*. <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2019/8/16/nagari-taram-juarai-lomba-desakelurahan-berprestasi-tingkat-regional-1-nasional>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 03.20 WIB.

*Technology*), dan sosial media berupa *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* yang berjalan aktif.

Disamping itu terdapat beberapa prestasi yang pernah diraih Nagari Taram diantaranya: Pertama, meraih peringkat terbaik 1 perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019; Kedua, Wali Nagari Taram mendapatkan penghargaan dari Bupati Lima Puluh Kota atas dedikasinya dalam penangan banjir; Ketiga, memperoleh Terbaik 1 Gerakan PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) tahun 2019; Keempat, juara 1 budidaya alpukat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Nagari Taram juga memiliki inovasi dan keunggulan nagari diantaranya: membuat kebijakan SATO SAKAKI sebagai bentuk kepedulian masyarakat nagari, menggalakkan Gebyar Taram menuju bebas Kanker Servik dan Iva Test, mempunyai rumah relawan pelita dan arisan jamban serta pembuatan lahan tidur untuk kebun jagung. Sehingga Nagari Taram menjadi pemenang lomba nagari berprestasi tingkat Lima Puluh Kota dua kali berturut-turut<sup>13</sup>

Pada lomba nagari tingkat Provinsi Sumatera Barat Nagari Taram mendapatkan pujian dari ketua tim penilai. Hal ini disampaikan oleh Syafrizal:<sup>14</sup>

“Saya lihat dari beberapa nagari yang telah dinilai Nagari Taram ini yang paling lengkap. Semua masyarakat ada di sini mulai dari Niniak Mamak, Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat. Untuk proses administrasinya kita telah lihat, memang saat ini Nagari Taram nilainya paling tertinggi.

<sup>13</sup> Kemendagri.go.id.2019. *Lakukan Penilaian, Tim Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Dan Kelurahan Turun Ke Daerah*. [http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/lakukan\\_penilaian\\_tim\\_klarifikasi\\_lapangan\\_lomba\\_](http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/lakukan_penilaian_tim_klarifikasi_lapangan_lomba_). Diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 02.30 WIB.

<sup>14</sup> Drs.H. Syafrizal. MM selaku ketua tim penilai dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. <https://beritasumbar.com/taram-dinilai-tim-nagari-berprestasi-tingkat-sumbar/>. Diakses pada tanggal 19 Juni Tahun 2022 kukul 02.56 WIB.

Namun tentunya hal ini harus dibarengi antara data yang ditampilkan dengan kondisi di lapangan, apakah sesuai atau tidak.”

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti memandang bahwa prestasi yang didapatkan oleh Nagari Taram tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah desa selaku elit lokal Nagari Taram, hal ini dapat dilihat dengan tingginya partisipasi masyarakat Nagari Taram dalam mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah nagari. Selain itu, tokoh masyarakat juga aktif terlibat dalam evaluasi perkembangan Nagari Taram guna untuk menjadikan Nagari Taram menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya. Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa adanya hubungan keterkaitan semua elit lokal Nagari Taram untuk mengakomodir berbagai gagasan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dan untuk kemajuan nagari.

Selain itu, Relis dalam media online minangsatu mengatakan bahwa Nagari Taram juga memiliki prestasi di bidang kesehatan. Nagari Taram menjadi nagari pertama SWA-JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Sumatera Barat, dan juga melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas dalam penanganan Kista. Melalui program desa SWA-JKN pemerintah Nagari Taram menggerakkan masyarakatnya untuk gotong royong agar memiliki kesadaran mendaftarkan diri dan anggota keluarganya serta komitmen untuk membayar iurannya.<sup>15</sup> Sementara itu, wali nagari Taram Defrianto Ifkar mengatakan bahwa akan selalu mendukung inovasi yang dilaksanakan pemerintah beserta pihak

---

<sup>15</sup> MINANGSATU, 2018. “Nagari Taram Terima Penghargaan Pelopor Desa SWA-JKN.” [https://minangsatu.com/nagari-taram-terima-penghargaan-pelopor-desa-swajkn\\_1063](https://minangsatu.com/nagari-taram-terima-penghargaan-pelopor-desa-swajkn_1063). Diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 04.05 WIB.

BPJS Kesehatan, berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwasanya kegiatan yang dirancang ataupun ditetapkan oleh pemerintah nagari untuk masyarakat Nagari Taram tidak terlepas dari peran elit lokal seperti wali nagari dan perangkat desa serta tokoh masyarakat yang ada di Nagari Taram.

Prestasi lain yang didapatkan oleh Nagari Taram melaju ke Tingkat Nasional dengan membawa inovasi dan keunggulan dimulai dari menjadikan lahan kritis menjadi lahan jagung yang bibitnya disediakan Walinagari Taram Defrianto Ifkar bagi masyarakat yang tidak mampu membeli bibit jagung.

**Gambar 1.1**  
**Pemberian Bibit Jagung Kepada Masyarakat**



Sumber: website Nagari Taram

Berdasarkan gambar 1.1 pemberian bibit jagung dari Wali Nagari Taram kepada masyarakat dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat Taram untuk mewujudkan Nagari Berprestasi di dukung oleh tindakan dari pemerintah itu sendiri dan peran elit lokal dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat. Peneliti melihat bahwa peranan elit lokal sangat penting dalam peningkatan partisipasi aktif masyarakat Nagari Taram dan prestasi yang didapatkan oleh

Nagari Taram, elit lokal menjadi peran kunci dalam keberhasilan Nagari Taram untuk mampu mendapatkan prestasi dalam tingkatan kabupaten hingga sampai kepada tingkat nasional.

Peneliti menilai bahwa kemauan masyarakat berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari Taram didasari oleh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan peranan elit lokal dalam membantu mewujudkan semua inovasi yang diciptakan dari permasalahan yang ada di Nagari Taram. Secara alamiah ketika pemerintah telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai wadah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat maka secara tidak langsung akan memberikan respon yang baik dari masyarakat itu sendiri yang ditunjukkan dengan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok yang mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Semua prestasi yang diraih Nagari Taram di Tingkat Nasional ini tidak lepas dari sosok Wali Nagari Taram yang sangat inovatif, ditambah pula dengan kerja keras perangkat Nagari Taram dan dukungan partisipasi yang tinggi dari lapisan masyarakat membuat Taram luar biasa. Maka sangat pantas Nagari Taram juara satu regional.”

---

<sup>16</sup> *Ibid*

**Gambar 1.2**  
**Prestasi Nagari Taram di Tingkat Nasional**



*Sumber: website Nagari Taram*

Dari beberapa data yang peneliti dapat dengan pernyataan-pernyataan di atas, peneliti mengasumsikan bahwa prestasi yang didapatkan oleh Nagari Taram tidak terlepas dari peran elit lokal dalam memobilisasi masyarakat, yang mampu membangun hubungan yang baik sehingga masyarakat Nagari Taram turut aktif dalam semua proses pembangunan nagari hingga akhirnya menjadi nagari berprestasi dengan memiliki banyak keunggulan, semua elemen masyarakat aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan nagari, memberikan ide-ide, melakukan pembangunan sarana dan prasarana nagari, serta mengikuti pelaporan pertanggung jawaban nagari, sehingga Nagari Taram dapat meraih penghargaan sebagai nagari berprestasi dari tingkat kabupaten hingga nasional.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran elit lokal dalam mewujudkan nagari berprestasi di Nagari Taram, dengan rumusan masalah: Bagaimana Peran Elit

Lokal Dalam Mewujudkan Nagari Berprestasi Di Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian fokus penelitian yang sudah peneliti jelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peran Elit Lokal Dalam Mewujudkan Nagari Berprestasi Di Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi diri peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus pada Peran Elit Lokal dalam Mewujudkan Nagari Berprestasi Di Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana bentuk Peran Elit Lokal dalam Mewujudkan Nagari Berprestasi Di Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

